# LAPORAN KINERJA INTERM
# TRIWULAN I TAHUN 2026

## BKHIT PROVINSI GORONTALO

## BADAN KARANTINA INDONESIA

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyelesaian Laporan Kinerja Interm Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Gorontalo Triwulan I Tahun 2026. Dokumen ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban formal pimpinan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan ini disusun oleh Kepala Balai, **Iswan Haryanto**, dan disampaikan secara resmi kepada Kepala Badan Karantina Indonesia, **Sahat Manaor Panggabean**.

Dalam perspektif manajemen kinerja, laporan triwulanan ini berfungsi sebagai instrumen pemantauan *real-time* yang krusial. Melalui evaluasi berkala di awal tahun, organisasi dapat memastikan seluruh target tahunan tetap berada pada jalurnya (*on track*), mengidentifikasi deviasi sejak dini, dan menetapkan langkah korektif yang berbasis data. Transparansi yang disajikan dalam laporan ini merupakan komitmen organisasi dalam mengelola mandat negara secara profesional, yang didukung oleh struktur organisasi serta tata kelola yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Gorontalo, 8 April 2026

Kepala Balai

BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
GORONTALO

Iswan Haryanto

# BAB I: PENDAHULUAN

**1.1 Penjelasan Umum Organisasi** BKHIT Provinsi Gorontalo merupakan garda terdepan dalam perlindungan sumber daya hayati di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Karantina Indonesia, instansi ini menjalankan fungsi vital pengawasan dan pengendalian kesehatan **hewan**, **ikan**, dan **tumbuhan**. Fokus operasional utama adalah mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (**HPHK**), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (**HPIK**), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (**OPTK**).

**1.2 Aspek Strategis Organisasi** Eksistensi BKHIT Gorontalo berlandaskan pada empat pilar strategis:

- **Perlindungan Sumber Daya Alam:** Menjaga keanekaragaman hayati dari ancaman jenis asing invasif, agensi hayati, serta pengawasan ketat terhadap tumbuhan dan satwa liar/langka.
- **Keamanan Pangan dan Pakan:** Menjamin produk asal hewan, ikan, dan tumbuhan memenuhi standar kesehatan dan keamanan konsumsi masyarakat.
- **Economic Tool:** Mendukung stabilitas ekonomi lokal melalui perlindungan sektor agrikultur dan perikanan, serta memfasilitasi percepatan arus perdagangan komoditas unggulan daerah.
- **Aturan Internasional:** Menyelaraskan standar karantina dengan ketentuan dunia, merujuk pada standar karantina hewan dan ikan dari *World Organization for Animal*

*Health* (**WOAH**) serta standar karantina tumbuhan berdasarkan *International Plant Protection Convention* (**IPPC**).

**1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issues)** Sebagai spesialis AKIP, kami mengidentifikasi hambatan mendasar yang berdampak langsung pada manajemen risiko kinerja:

"Tantangan utama mencakup keterbatasan tenaga teknis spesialis di bidang Karantina Hewan (**KH**) dan Karantina Ikan (**KI**). Selain itu, transisi menuju integrasi penuh *Barantin System* menghadapi kendala prasarana teknologi (PC dan Laptop) yang sudah tidak memadai. Kegagalan dalam pembaruan perangkat keras ini secara langsung mengancam pencapaian target **SLA 100%** yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja."

Isu strategis tersebut menjadi landasan dalam menetapkan prioritas perencanaan kinerja agar alokasi sumber daya dapat difokuskan pada mitigasi risiko operasional, sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

## BAB II: PERENCANAAN KINERJA

**2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja 2026** Sasaran kinerja tahun 2026 diarahkan pada transformasi layanan perkarantinaan yang profesional, partisipatif, dan transparan. Perencanaan ini menitikberatkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi proses bisnis.

**2.2 Program dan Anggaran** Dukungan anggaran tahun 2026 didistribusikan untuk memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan dan dukungan manajemen internal:

| Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 3.324.387.000 |
| Dukungan Manajemen | 8.718.325.000 |
| **Total** | **12.042.712.000** |

**2.3 Perjanjian Kinerja 2026** Komitmen kinerja Kepala Balai tertuang dalam 21 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target |
|---|---|---|
| **SK 4.1** Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK | 1. Hasil pemantauan untuk kebijakan karantina (%) | 85 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK (%) | 87 |
| | 3. Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit (%) | 87 |
| **SK 4.2** Pengawasan keamanan pangan dan pakan | 4. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar (%) | 35 |
| | 5. Persentase pemasukan pakan tersertifikasi (%) | 81 |
| **SK 4.3** Penurunan laju spesies asing invasif | 6. Persentase keberhasilan pencegahan spesies asing (%) | 82 |
| **SK 4.4** Optimasi sumber daya hayati berkelanjutan | 7. Persentase lalu lintas sesuai perundang-undangan (%) | 65 |
| **SK 4.5** Penerapan sistem ketertelusuran | 8. Persentase ketertelusuran komoditas prioritas (%) | 86 |
| **SK 4.6** Sinergitas pengawasan dan penindakan | 9. Persentase kasus pelanggaran yang diselesaikan (%) | 76 |
| **SK 4.7** Pemanfaatan sarana prasarana | 10. Tingkat pemanfaatan prasarana karantina (%) | 85 |
| **SK 4.8** Sertifikasi kesehatan karantina | 11. **Persentase sertifikat kesehatan yang diterbitkan (%)** | **85** |
| **SK 5.1** Tata kelola manajemen internal transparan | 12. Nilai Maturitas **SPIP** (Nilai) | 2.8 |
| | 13. Persentase rekonsiliasi kinerja (%) | 86 |
| | 14. Tingkat kepatuhan pengelolaan aset (%) | 75 |
| | 15. Tingkat kepatuhan tata kelola **PBJ** (%) | 80 |
| | 16. Nilai Kinerja Anggaran (Nilai) | 86 |
| | 17. Realisasi PNBP (%) | 57 |
| | 18. Persentase penyelesaian temuan **LHP BPK** (%) | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| | 19. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan (%) | 86 |
| **SK 5.2** Budaya birokrasi profesional (BerAKHLAK) | 20. **Persentase kepatuhan Service Level Agreement (%)** | **100** |
| | 21. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 82 |

Kuantifikasi atas 21 indikator ini berfungsi sebagai basis evidensi primer bagi analisis akuntabilitas kinerja yang akan dibahas secara mendalam pada bab selanjutnya.

## BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

**3.1 Pengukuran dan Capaian Kinerja Triwulan I** Metodologi pengukuran menggunakan integrasi data dari aplikasi **SAKTI** untuk aspek finansial dan **E-Kinerja Barantin** untuk capaian *output* teknis. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang guna memastikan validitas pelaporan kinerja interm ini.

**3.2 Analisis Capaian Indikator Utama** Realisasi Triwulan I 2026 secara umum menunjukkan tren stabilitas, dengan penekanan pada beberapa poin strategis:

- **Standardisasi Monitoring:** Berbeda dengan pola tahun 2025 yang mengalami anomali volume media pembawa (capaian 446% dan 200%), pemantauan tahun 2026 telah distandarisasi untuk menghindari inflasi kinerja artifisial, sehingga data mencerminkan kondisi riil di lapangan.
- **Indikator Periodik:** Indikator seperti Nilai **AKIP**, Maturitas **SPIP**, dan **IKM** berstatus **"Berjalan/Belum Waktunya Penilaian"**, mengingat evaluasi formal dilakukan pada siklus semesteran atau akhir tahun.
- **Risiko SLA (IKK 20):** Meskipun realisasi saat ini masih terjaga, terdapat risiko penurunan kecepatan layanan akibat kendala *hardware* yang telah diidentifikasi pada Bab I. Hal ini menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko operasional.

**3.3 Analisis Penyebab dan Solusi** Terdapat dinamika yang memerlukan intervensi manajemen:

- **Registrasi Pihak Lain:** Target permohonan registrasi pihak ketiga belum optimal karena faktor eksternal berupa rendahnya permintaan (*demand-side*) dari pelaku usaha di awal tahun.
- **Solusi Strategis:** Organisasi menginstruksikan koordinasi intensif dengan unit **Kewasdakan** (Pengawasan dan Penindakan) untuk melakukan sosialisasi proaktif guna mendorong kepatuhan dan minat registrasi perusahaan.
- **Adaptasi Barantin System:** Intensifikasi pendampingan bagi operator dilakukan untuk meminimalisir kendala transisi sistem digital.

Hasil analisis akuntabilitas ini menjadi landasan dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi strategis bagi pimpinan organisasi.

## BAB IV: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

**4.1 Kesimpulan** Capaian kinerja BKHIT Provinsi Gorontalo pada Triwulan I 2026 diklasifikasikan dalam kategori **Baik**. Secara substansial, organisasi mampu menjaga integritas layanan meski berada dalam fase transisi sistem dan keterbatasan sarana. Seluruh fungsi perlindungan sumber daya hayati melalui pengawasan **HPHK**, **HPIK**, dan **OPTK** berjalan sesuai mandat, dengan tingkat kepatuhan administrasi yang terus meningkat.

**4.2 Rekomendasi Strategis** Guna memastikan target akhir tahun tercapai secara paripurna, manajemen memberikan instruksi sebagai berikut:

1. **Optimasi Anggaran:** Pengelola keuangan diinstruksikan segera melakukan revisi anggaran pada komponen dengan penyerapan rendah untuk dialokasikan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada layanan publik.
2. **Pengembangan Kapasitas SDM:** Melaksanakan pelatihan teknis intensif bagi operator Monev untuk meningkatkan penguasaan sistem evaluasi kinerja terbaru, guna menjamin akurasi data pelaporan.
3. **Inovasi dan Peremajaan Teknologi:** Percepatan proses pembaruan prasarana (PC/Laptop) menjadi mandat utama guna mendukung implementasi *Barantin System* secara optimal, sekaligus menjamin pertahanan target **SLA 100%**.

BKHIT Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen penuh untuk terus memperkuat sistem perkarantinaan nasional demi kedaulatan pangan dan kelestarian sumber daya hayati Indonesia.